





















majalah *Panji Masyarakat* yang dibredel oleh Soekarno. Pada tahun 1965, tepatnya pada pemerintahan Orde Baru, Hamka secara total berperan sebagai ulama. Hamka meninggalkan dunia politik dan sastra. Tulisan-tulisannya di *Panji Masyarakat* sudah merefleksikannya sebagai seorang ulama, dan penuturan Hamka yang sangat bagus dapat dibaca pada rubrik “Dari Hati Ke Hati”. Hamka dikenal sebagai seorang moderat, tidak pernah Hamka mengeluarkan kata-kata keras, apalagi kasar dalam berkomunikasi. Hamka lebih suka memilih menulis roman atau cerpen dalam menyampaikan pesan-pesan moral Islam.

Ada satu yang sangat menarik dari Hamka, yaitu keteguhannya memegang prinsip yang diyakini. Inilah yang membuat semua orang menyeganinya. Sikap independen Hamka bukanlah hal yang baru. Pada zaman pemerintah Soekarno, Hamka berani mengeluarkan fatwa haram menikah lagi bagi Presiden Soekarno. Sehingga fatwa itu membuat Presiden Soekarno marah. Tidak hanya berhenti di situ saja, Hamka juga terus-terusan mengkritik kedekatan pemerintah dengan PKI waktu itu.

Maka wajar saja kalau akhirnya Hamka dijebloskan ke penjara oleh Soekarno. Bahkan majalah yang dibentuknya *Panji Masyarakat* pernah dilarang terbit oleh presiden Soekarno karena menerbitkan tulisan Bung Hatta yang berjudul *Demokrasi Kita*. Tulisan itu berisi kritikan tajam terhadap konsep Demokrasi Terpimpin yang dijalankan presiden Soekarno. Ketika tidak lagi disibukkan dengan urusan-urusan politik, sejak saat itu Hamka memusatkan kegiatan dalam dakwah Islamiyah dan menjadi Imam Masjid agung Al-Azhar

































Bagi Hamka menghadapi ideologi komunis haruslah dengan ideologi yang dapat mengatasi mereka. Dalam hal ini Islam adalah senjata, karena sebagian besar masyarakat Indonesia beragama Islam. Tetapi masyarakat harus bekerja sama dengan pemerintah yang anti komunis, itulah pertimbangan Hamka yang pertama.

Pertimbangan kedua, umat Islam sudah sejak lama disakiti oleh pihak yang berkuasa. Ini adalah sisa-sisa indoktrinasi yang telah ditanamkan oleh PKI dan orde lama. Akibatnya, apapun yang baik yang hendak dilakukan selalu dicurigai. Umat Islam menganggap bahwa segala upaya yang datang dari pemerintah untuk mengatur dan membangun Negara adalah salah, umat Islam telah kehilangan pertimbangan pada setiap apapun yang datang dari pemerintah.

Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan alasan-alasan diatas, Hamka menilai kehadiran Majelis Ulama' Indonesia sangat diperlukan demi memajukan kesejahteraan bangsa. Mukti Ali sebagai menteri agama pada saat itu memberikan respon positif terhadap keputusan Hamka dengan mengatakan bahwa kehadiran Majelis Ulama' Indonesia sudah sangat diharapkan, baik oleh pemerintah maupun umat Islam di Indonesia, bahkan sejarah mengharuskan adanya Majelis Ulama' Indonesia.

Dari golongan pemuda Islam, kritik-kritik terhadap Hamka semakin meningkat sejak diterimanya jabatan itu. Apalagi setelah foto Hamka bersama menteri agama dan menteri penerangan manshuri dimuat dikoran. Dalam kepemimpinan Hamka, Majelis Ulama' Indonesia ternyata cukup memegang

prinsip-prinsip Islam. Keberanian memilih serta menentukan langkah seharusnya menjadikan pedoman umat. Dalam kedudukannya, Hamka tidak ragu dan malu menyatakan kebenarannya dihadapan penguasa Negara.

Sikap tegas dan komitmen Hamka terhadap kepentingan agama dan umat Islam dibuktikannya pada saat Majelis Ulama' Indonesia diundang oleh Letjen Kartakusumah dari Dewan Pertahanan Keamanan Nasional (Wanhankamnas), untuk menghadiri dengar pendapat tentang penafsiran pancasila dan UUD 1945 yang akan dirumuskan dalam sidang umum MPR tahun 1978. Disana Hamka menjelaskan tentang pendirian Islam mengenai masalah-masalah keagamaan yang mendasar, yaitu jika sekiranya pemerintah atau Dewan Keamanan Nasional menganjurkan faham bahwa sila dari sila pertama pancasila mempunyai kedudukan yang sama. Agar seseorang akan tetap pada keyakinannya yaitu tauhid.

Bagi Hamka seperti yang tertulis dalam bukunya "Urat Tunggang Pancasila", seseorang yang percaya kepada Tuhan pasti berperikemanusiaan. Orang yang percaya kepada Tuhan pasti mempertahankan persatuan Indonesia, hal ini dikarenakan seseorang telah beriman kepada Tuhan. Sebab persatuan Indonesia merupakan suatu perjanjian sebagai suatu bangsa yang sadar. Janji itu dinamakan *Jakarta Charter* 22 Juni 1945.

Pada rapat kuartal II, Majelis Ulama' Indonesia pada bulan Agustus 1977. Hamka mengutarakan persepsinya mengenai peranan ulama' bahwa agama adalah komponen pokok yang harus diperhitungkan oleh pemegang kekuasaan





dari penyakit jasmani. Orang yang ditimpa penyakit jiwa akan kehilangan makna hidup yang hakiki, penyakit jiwa lebih berbahaya dari penyakit badan.

Adapun hakikat dari akhlak ialah suatu persediaan yang telah ada dalam bathin, telah terhunjam dalam sanubari. Budi yang menimbulkan perangai dengan mudahnya tapa memerlukan pemikiran yang panjang. Perangai yang mulia menurut akal dan syara' itulah yang dinamai akhlak yang baik. Apabila yang tumbuh adalah perangai yang tercela menurut akal dan syara' dinamakan akhlak yang buruk atau jahat. Budi yang mulia menurut Hamka merupakan kelebihan manusia daripada makhluk yang lainnya.

Karena segala perbuatan manusia timbul dari timbangannya. Timbangan itu mempersesuaikan antara tujuan (*ghayah*) dan jalan mencapai tujuan (*wasilah*). Serta timbangannya pula akibat-akibat yang diterima apabila suatu pekerjaan itu dilakukan. Lebih jauh Hamka mencontohkan bahwa pergaulan mengijinkan dan menyuruh berani berjuang di medan perang ialah kemuliaan masyarakat, bangsa dan tanah air. Orang yang tidak mau mati seperti itu berarti dipandang sebagai seseorang yang rendah budi atau rendah kemanusiaannya.

Manusia tidak hanya membutuhkan kesenangan pribadi saja, tetapi menurut Hamka, haruslah dipikirkan kesenangan bersama. Karena hakikat kesenangan diri itu tidak ada, apabila tidak ditemukan kesenangan bersama. Itulah menurut Hamka tujuan kemanusiaan yang paling tinggi, yaitu keutamaan budi sebagai tujuan yang paling akhir, karena itulah bedanya



























